

**TINJAUAN HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN KREDIT
BANK TERHADAP NASABAH
(Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Kartasura)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

MUCHAMMAD NUR SOLIKIN

NIM : C.100.060.081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perbankan adalah mengatur lalulintas peredaran uang dalam masyarakat, yang dapat diartikan bahwa ada sebagian masyarakat menyimpan uangnya dan sebagian lagi menggunakan uang untuk pinjaman. Kegiatan tersebut memiliki kekhususan tersendiri, yaitu memperdagangkan apa yang disebut resiko dan pelayanan. Antara resiko dan pelayanan memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu bila pelayanan ditingkatkan maka hal tersebut akan meningkatkan resiko juga. Terjadinya hubungan tersebut memang suatu yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Misal, bank dalam menghadapi persaingan berusaha meningkatkan pelayanan yang diberikan agar produk yang ditawarkan tersebut terkesan mudah dijual atau lebih menarik minat nasabah. Akan tetapi bila persyaratan dipermudah sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada nasabah atau masyarakat, maka sebenarnya sejak saat itu pula tingkat resiko yang harus diterima oleh bank menjadi lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila perhatian terhadap resiko lebih diutamakan, maka pelayanan yang dapat diberikan akan berkurang, sehingga produk yang ditawarkan akan menjadi lebih sulit untuk dipasarkan. Dalam pengertian sempit, seolah-olah aktifitas bank hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito maupun

tabungan, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit.

Kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi segala jenis kegiatan dunia usaha, industri, dan ekonomi, bahkan merupakan sumber pembiayaan utama. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengartikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berbagai prinsip mengenai perkreditan yang sehat telah diperkenalkan hampir di seluruh negara. Kreditor tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik apabila ia tidak memahami prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional. Mengenai prinsip kehati-hatian juga dapat dijelaskan di

Undang-Undang Bank Indonesia pada menimbang poin c, bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kreditnya.¹

Dana yang akan diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan investasi dalam bentuk lain, dan terutama dalam bentuk pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman

¹ Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003. Hlm. 140.

yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikan faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.²

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kata “kredit” mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar ini, pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang, maka di sini terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan prestasi tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah suatu hal yang abstrak, yang sukar untuk diraba, karena antara masa pemberian dan penerimaan kembali prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun.³

Pada umumnya pengajuan kredit adalah perorangan atau manusia dan badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Manusia dan badan usaha yang berbadan hukum adalah sebagai subyek hukum. Seorang analisis kredit dan pejabat yang bertugas di unit kerja

² Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm. 299.

³ Edy Putra Tje' Aman. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty. 1989. Hlm. 10.

perkreditan harus mampu memahami seluk beluk aspek-aspek hukum permohonan kredit. Untuk itu analisis aspek hukum pemohon kredit pertama kali harus dilakukan sebelum meluluskan pemberian kredit. Apa yang menjadi kunci aspek hukum manusia dan apa yang kunci aspek hukum badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi dan Badan Usaha yang bukan badan hukum seperti Firma, *Comanditer Venootschap* (CV) harus dipahami dengan sempurna.⁴

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah.⁵ Bank tidak mau mengambil resiko terhadap suatu masalah yang diberikan terhadap kesalahan suatu analisis kredit karena hal ini akan mempengaruhi reputasi dari kinerja bank.

Oleh karena itu dalam suatu pemberian kredit terlebih dahulu bank melakukan analisis kredit, yaitu dengan penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap prinsip 5^c yaitu jaminan (*collateral*), watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*) dan prospek usaha (*condition*). Analisis kredit tersebut dengan tujuan utama untuk memperoleh

⁴ Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta. 2004. Hlm.9.

⁵ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002. Hlm 101.

keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik, dan melakukan pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan baik.

Proses analisis dari suatu permohonan kredit dilakukan bank, apakah surat-surat yang telah dibutuhkan lengkap atau belum atau terdapat unsur lain terhadap pihak debitur atas keberatan terhadap syarat yang diajukan, sehingga bank dapat melakukan penolakan terhadap permohonan kredit itu. Oleh karena sebelumnya bank telah mengenal reputasi calon debitur, biasanya analisis atas kelayakan permintaan kredit yang mereka ajukan akan dibatasi pada faktor-faktor pengaruh tertentu saja. Semua data dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh *account officer*, serta hasil analisis data dan informasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan masukan penting yang akan dijadikan sebagai evaluasi pemberian atau penolakan terhadap suatu kredit yang akan diajukan.

Dalam suatu penolakan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap suatu permohonan kredit yang bersangkutan seharusnya disertai dengan alasan penolakan sebagai transparansi dari pihak bank. Namun kalangan perbankan tidak menyetujui usul tersebut, karena dimungkinkan alasan tersebut bersifat sangat pribadi, sehingga tidak mungkin diberitahukan kepada calon debitur yang mungkin akan berakibat terhadap pencemaran nama baik dari pihak debitur tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN KREDIT BANK TERHADAP NASABAH (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Kartasura)”**

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan sekaligus untuk menghindarkan kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang hendak diteliti, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Pembatasan wilayah penelitian ini hanya terbatas pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Kartasura di Kabupaten Sukoharjo.
2. Obyek penelitian penulis membatasi hanya mengenai tinjauan hukum penolakan permohonan kredit bank terhadap nasabah khususnya.
3. Pembahasan dalam skripsi ini akan difokuskan khusus pada praktek perkreditan di bidang perbankan konvensional, tidak termasuk praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Perumusan masalah ini bertujuan, agar isi tulisan dan ruang

lingkup utama ini terbatas pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Atas dasar pembatasan masalah di atas, maka permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penolakan permohonan kredit yang dilakukan Bank terhadap Nasabah di BRI Cabang Solo Kartasura?
2. Apakah penolakan terhadap permohonan kredit yang dilakukan oleh BRI Cabang Solo Kartasura telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan yang jelas, agar penelitian tersebut dapat dicapai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk penolakan permohonan kredit yang dilakukan Bank terhadap Nasabah di BRI Cabang Solo Kartasura.
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukumnya dari adanya penolakan terhadap permohonan kredit yang terjadi di Bank BRI Cabang Solo Kartasura.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan bagi penulis manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan penolakan permohonan kredit di Bank.
- b. Untuk lebih mendalami teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan.
- c. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan apa yang diteliti.
- b. Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan bentuk penelitian hukum. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan penalaran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam suatu gejala yang bersangkutan.⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, merupakan metode yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat gambaran secara umum dan menyeluruh tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan dan lebih terfokus pada ruang lingkup penelitian sehingga menjadi lebih terarah. Maka untuk memperoleh data yang berkaitan tentang permasalahan yang timbul,

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984. Hlm 43.

⁷ Rony Hanitijo S. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta. 1988. Hlm 97.

penulis mengambil lokasi penelitian di Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Kartasura yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 132 Kartasura.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Guna memperoleh data primer, dilakukan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu dengan cara wawancara, yaitu

⁸ Khuzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta: FH UMS. 2004. Hlm 47.

metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diteliti,⁹ khususnya pihak pegawai bank yang terkait dan pihak nasabah itu sendiri.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata.¹¹

Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

⁹ Sugiarto, Dergibson, Siagian. *Teknik Sampling*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001. Hlm 44.

¹⁰ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya. 2006. Hlm.280.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Op Cit*. Hlm. 32.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam skripsi ini, sistematika penyusunan terdiri dari empat bab, dimana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematikan Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Perbankan
 - 1. Pengertian Bank
 - 2. Jenis-jenis Bank
 - 3. Dasar Hukum Bank
- B. Perjanjian Pada Umumnya
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Asas Dalam Hukum Perjanjian
 - 4. Hapusnya Perjanjian

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit
2. Unsur-unsur Kredit
3. Tujuan dan Fungsi Kredit
4. Prinsip Kehati-hatian Perkreditan
5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

D. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit
2. Lahirnya Perjanjian Kredit
3. Bentuk Perjanjian Kredit

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Bank Rakyat Indonesia

B. Bentuk penolakan permohonan kredit yang dilakukan Bank terhadap Nasabah di BRI Cabang Solo Kartasura.

C. Tinjauan hukum terhadap penolakan permohonan kredit yang dilakukan oleh BRI Cabang Solo Kartasura.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran